

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perubahan iklim mengacu pada perubahan pola cuaca dan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana ke atmosfer melalui kegiatan-kegiatan industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan penggundulan hutan.

Negara-negara industri telah berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim. Beberapa negara industri tersebut adalah Amerika Serikat, Cina, Rusia, Jepang, dan Uni Eropa. China merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, terutama dikarenakan ketergantungan negara tersebut terhadap batu bara untuk pembangkit listrik. Negara-negara ini memiliki perekonomian yang besar dengan tingkat konsumsi energi yang tinggi, terutama yang ditenagai oleh bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Alhasil, melalui kegiatan tersebut dilepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan gas rumah kaca ke atmosfer (EPA, 2023).

Perubahan iklim yang mana disebabkan oleh gas rumah kaca dan pembakaran bahan bakar fosil merupakan salah satu isu lingkungan yang sangat mendesak dan harus segera ditangani oleh semua aktor di dunia. Deforestasi yang mana didorong oleh perluasan lahan pertanian dan

ekstraksi sumber daya alam juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Pencemaran udara dan air yang disebabkan oleh kegiatan industri dan penciptaan transportasi juga memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Penggunaan bom dan perubahan iklim yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati berdampak negatif terhadap fungsi ekosistem dan kesejahteraan umat manusia. Kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh pemanasan global dan pencairan es serta gletser juga berdampak negatif terhadap masyarakat yang tinggal di dataran rendah, terutama negara-negara kecil/kepulauan. Pembakaran bahan bakar fosil merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim. Gas rumah kaca dan karbon dioksida yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan kenaikan suhu global yang sangat signifikan sehingga meningkatkan frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem, perubahan pola presipitasi, dan peningkatan permukaan laut (DCCEEW, 2022).

*The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* merupakan badan internasional terkemuka yang bertugas untuk memeriksa terkait perubahan iklim. IPCC telah menyatakan bahwa terdapat 95-100% kemungkinan bahwa yang menyebabkan pemanasan pada abad ke-20 adalah karena aktivitas manusia yang tidak selaras dengan kelestarian lingkungan/alam. IPCC juga menunjukkan bahwa konsentrasi karbon dioksida di atmosfer telah mencapai tingkat tertinggi setidaknya dalam 800.000 tahun, terutama yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar

fosil (DCCEEW, 2022).

Salah satu cara utama bagaimana perubahan iklim berdampak terhadap kebakaran hutan dalam melalui peningkatan suhu dan pola curah hujan. Naiknya suhu dapat menyebabkan kekeringan sehingga memudahkan hutan menjadi lebih rentan terhadap kebakaran. Di samping itu, perubahan pola cuaca juga dapat mengubah waktu dan intensitas pertumbuhan vegetasi musiman sehingga menyebabkan lebih banyak bahan bakar yang mudah terbakar (C2ES, 2022). Perubahan iklim juga mempengaruhi kejadian sambaran petir yang mana merupakan penyebab signifikan kebakaran hutan. Pada saat atmosfer menghangat, hal tersebut menciptakan kondisi yang tidak stabil dan meningkatkan frekuensi dan intensitas badai petir yang dapat menyebabkan kebakaran (BORUNDA, 2022).

Kenaikan permukaan laut merupakan dampak perubahan iklim yang paling signifikan di bumi. Penyebab utamanya adalah pemanasan atmosfer bumi dan lautan akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca dan karbon dioksida di atmosfer. Di saat suhu planet bumi naik, maka es dan gletser yang ada di kutub menjadi mencair, sehingga menambahkan volume air di lautan. Selain itu, suhu hangat yang ada di lautan menyebabkan air menjadi naik, yang selanjutnya juga akan berdampak pada kenaikan permukaan laut (NUNEZ, 2022).

Laju peningkatan permukaan laut terjadi sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir dan telah diperkirakan akan terus meningkat seiring

berjalannya waktu. Berdasarkan laporan IPCC dinyatakan permukaan laut secara global telah meningkat sekitar 15 cm atau 6 inci. Pada masa sekarang, tingkat kenaikan permukaan laut telah mencapai 3,6 mm atau 0,14 inci per tahun sejak tahun 2006. yang mana diproyeksikan mencapai dua kali lipat dari sebelumnya (IPCC, 2019).

Setiap negara terkena dampak dari perubahan iklim tersebut, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Amerika Serikat, India, bahkan Afrika Selatan telah merasakan beberapa peristiwa cuaca ekstrem di mana polanya berubah dan lebih intensif, agresif, serta lebih banyak energi yang mana berarti akan terdapat lebih banyak badai, banjir, angin topan, dan kekeringan terjadi pada tahun mendatang.

Dampak kenaikan permukaan laut sangat luas dan signifikan. Naiknya permukaan laut dapat meningkatkan risiko banjir di daerah pesisir, erosi, intrusi air asin ke akuifer air tawar, dan peningkatan kerentanan terhadap gelombang badai dan angin topan (IPCC, 2019). Di sisi lain, dampak kenaikan permukaan laut terhadap manusia, satwa liar, infrastruktur dan ekonomi juga diperkirakan akan signifikan dan berjangkauan luas.

Dari sekian banyak dampak yang dihasilkan, Naiknya permukaan laut merupakan salah satu dampak paling mendesak yang dapat berpotensi menenggelamkan entitas suatu negara tertentu terutama negara kecil atau negara kepulauan. Terdapat beberapa fakta yang memperlihatkan bahwa es di Greenland dan Antartika lambat laun menyusut dan menunjukan

peningkatan muka air laut. Pencairan es di kutub yang disebabkan oleh peningkatan suhu permukaan di bumi, meningkatkan risiko banjir, menurunnya persediaan air, dan bahkan memberikan ancaman kepada seperenam penduduk yang ada di bumi (Fred Pearce, 2002).

Hal tersebut yang membuat negara-negara kecil kepulauan menjadi pihak yang paling rentan terhadap naiknya permukaan laut, misalnya negara-negara berlokasi di Kepulauan Pasifik seperti Tuvalu, Kiribati, Maladewa, dan Kepulauan Marshall. Dampak lainnya dari kenaikan permukaan laut adalah meningkatnya genangan dan banjir pantai, eksaserbasi erosi, intrusi air asin ke sungai, dan perubahan pengendapan sedimen ((Mimura, 1999). Perubahan iklim mengancam rumah, budaya, dan komunitas lebih dari setengah juta orang yang tinggal di empat negara Kepulauan Marshall (Aridi, 2020).

Penelitian ini dikhususkan untuk membahas Kepulauan Marshall atau yang sering disebut dengan *Marshall Island*. Kepulauan Marshall adalah negara kepulauan terletak di Pasifik barat, letaknya di antara Hawaii dan Australia. Negara ini memiliki populasi 59.000 dengan luas daratan hanya 180 km persegi yang berseberangan antara Nauru dan Kiribati, Pulau Wake di Utara, dan seberang timur Negara Federasi Mikronesia (Mcdonald, 2021). Kepulauan Marshall juga merupakan salah satu negara maritim dimana mayoritas kawasannya adalah perairan. Kepulauan Marshall mempunyai 29 pulau karang dan terdapat juga 5 pulau terpencil. Ecowatch menyatakan bahwa wilayah tersebut mengalami kenaikan

permukaanair laut dengan kecepatan 0,3 inci per tahun sejak 1993 (Aridi, 2020).

Terdapat banyak prediksi terkait tenggelamnya kepulauan tersebut, seperti yang telah dikemukakan melalui Survei Geologi AS bahwa “Beberapa pulau di Kepulauan Marshall akan tenggelam, ada yang tidak lagi memiliki air minum yangbersih karena akuifernya akan terkontaminasi air asin, Akibatnya, penduduk Kepulauan Marshall akan bermigrasi jauh dari tanah air mereka.” (Adetunji, 2020). Kenaikan laut disebabkan oleh perubahan iklim menjadi perhatian utamabagi kepulauan Marshall, negara kepulauan tersebut telah mengalami dampak kenaikan permukaan laut, termasuk erosi pantai, intrusi air asin ke dalam akuifer air tawar dan meningkatnya kerentanan terhadap badai dan angin topan. Kenaikan permukaan laut mengancam mata pencaharian masyarakat Kepulauan Marshall, bahkan rumah, tanaman, dan warisan budaya mereka. Naiknya permukaan laut di Kepulauan Marshall diproyeksikan akan membahayakan 40 persen bangunan yang ada di ibukota, Majuro, dengan 96% wilayah kota tersebutberisiko mengalami banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim (World Bank, 2021a).

Para peneliti telah memperkirakan bahwa dampak adanya perubahan iklim akan memperburuk kestabilan politik dan menjadi katalisator konflik. “Perubahan iklim juga mengancam *biosecurity* disebabkan kenaikan suhu yang menjadi jawaban atas penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti demam berdarah, ebola, dan lain-lain” (Liebenguth, 2017).

Negara Kepulauan ini dianggap sebagai salah satu yang paling rentan di dunia terhadap dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut, dan banyak penduduk telah terpaksa meninggalkan tanah leluhur mereka dan pindah ke tempat yang lebih tinggi. Pemerintah Kepulauan Marshall berupaya mengatasi dampak kenaikan permukaan laut melalui langkah-langkah adaptasi seperti membangun tanggul laut, memulihkan ekosistem pesisir, dan meningkatkan akses ke air minum yang aman.

Negara-negara maju telah berjanji lebih dari satu dekade lalu untuk memobilisasi \$100 miliar per tahun pada tahun 2020 untuk membantu negara yang lebih miskin dalam mengatasi dampak perubahan iklim, namun mereka gagal.” (Sancken et al., 2021). Kepulauan Marshall, seperti banyak negara lain, telah mengambil langkah dalam mengatasi perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Kepulauan Marshall terlibat dalam beberapa perjanjian internasional yang ditujukan untuk mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, antara lain:

1. *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*: Kepulauan Marshall adalah penandatangan perjanjian ini, yang menetapkan tujuan untuk membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.
2. *Paris Agreement*: Kepulauan Marshall telah meratifikasi Perjanjian Paris, yang mana perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan negara-negara dalam menghadapi dampak perubahan

iklim.

3. *Pacific Islands Forum*: Kepulauan Marshall adalah anggota dari organisasi regional ini, yang bekerja untuk mengatasi dampak perubahan iklim di kawasan Pasifik.

Selain itu, pemerintah Kepulauan Marshall telah mengembangkan rencana aksi nasionalnya sendiri tentang perubahan iklim, yang mencakup langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak kenaikan permukaan air laut. Kepulauan Marshall secara aktif terlibat dalam upaya internasional dan nasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Kepulauan Marshall memperoleh peranan penting dalam proses advokasi dalam negosiasi di Konferensi-konferensi yang membahas tentang perubahan iklim. Pada Konferensi Perubahan Iklim oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, Kepulauan Marshall menjadi salah satu aktor internasional yang cukup disorot karena telah menuntut agar negara-negara industri sebagai penghasil emisi gas karbon terbesar di dunia untuk memberikan kompensasi berupa materi sesuai dengan kerugian yang mungkin akan dihasilkan oleh kegiatan negara-negara tersebut (UN, 2015).

Urgensi penelitian ini didasarkan oleh beberapa alasan. Kepulauan Marshall menjadi salah satu negara kepulauan yang paling rentan terhadap perubahan iklim terutama peningkatan permukaan laut, yang mana dampak tersebut mengakibatkan kehidupan dan mata pencaharian

masyarakat Kepulauan Marshall terancam, bahkan terdapat prediksi bahwa negara tersebut tidak dapat dihuni di masa depan. Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab dalam melindungi negara dan masyarakat yang paling rentan dari dampak perubahan iklim. Tanggung jawab tersebut telah tercantum dalam UNFCCC dan Perjanjian Paris, jika masyarakat internasional tidak berhasil dalam mengambil tindakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim Kepulauan Marshall, maka hal tersebut dianggap sebagai kegagalan dari tanggung jawab yang telah disepakati secara internasional.

Dampak perubahan iklim di Kepulauan Marshall mempunyai implikasi yang lebih luas bagi hubungan internasional, Kepulauan Marshall memiliki populasi sekitar 59.000 orang dan jika masyarakat internasional gagal dalam mengambil tindakan penanggulangan perubahan iklim, hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan dan konflik atas sumber daya, pemindahan orang, dan masalah keamanan lainnya. Perubahan iklim merupakan isu internasional dan membutuhkan upaya yang terkoordinasi dari setiap negara untuk mengurangi dan beradaptasi dengan dampaknya. Kegagalan dalam mengatasi perubahan iklim akan memberikan konsekuensi tidak hanya Kepulauan Marshall tetapi juga seluruh isi planet bumi.

Dalam Hubungan Internasional, isu perubahan iklim di Kepulauan Marshall memiliki relevansi dalam beberapa lingkup terkait Kerja Sama Internasional, Diplomasi dan Negosiasi, Pemerataan dan Keadilan,

Dinamika Kekuasaan, dan Lembaga Internasional.

Perubahan iklim merupakan masalah global yang memerlukan relevansi-relevansi tersebut dalam mengatasinya, Studi Hubungan Internasional dapat membantu dalam proses identifikasi cara terbaik untuk mempromosikan kerjasama dan membangun kemitraan antar negara, membantu dalam mengidentifikasi strategi diplomasi dan taktik negosiasi, mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam kebijakan iklim internasional untuk memastikan bahwa populasi manusia rentan menjadi tidak tertinggal, membantu dalam proses distribusi kekuatan antar negara dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kebijakan dan negosiasi iklim, serta melalui UNFCCC, studi Hubungan Internasional dapat berpartisipasi dalam memperkuat lembaga-lembaga ini menjadi lebih efektif dalam mengatasi perubahan iklim.

Kepulauan Marshall telah membuat beberapa kebijakan secara nasional dan internasional dalam mengatasi perubahan iklim. Namun, negara kepulauan tersebut masih memiliki probabilitas yang tinggi untuk tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. Oleh sebab itu, yang menjadi bahasan utama dalam penelitian adalah "*Mengapa Penerapan Kebijakan Penanganan Perubahan Iklim Kepulauan Marshall tidak efektif.*" Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan Teori "*Green Theory*".

Dalam konteks perubahan iklim, *Green Theory* memberikan kerangka holistik untuk memahami penyebab dan konsekuensi dari masalah, serta pengembangan solusi yang mempertimbangkan faktor ekonomi dan

lingkungan. Oleh sebab itu, isu ini sangat penting untuk diteliti. Isu ini termasuk ke dalam masalah yang kompleks dan memerlukan keterlibatan melalui aktor nasional maupun internasional demi mewujudkan masa depan umat manusia, khususnya di negara-negara kecil kepulauan seperti Kepulauan Marshall.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Melalui permasalahan di atas, penelitian akan menjawab pertanyaan yang berupa *“Mengapa Penerapan Kebijakan Penanganan Perubahan Iklim Kepulauan Marshall tidak efektif?”*

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Terdapat dua tujuan penulisan penelitian, yaitu :

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan dalam mendeskripsikan fenomena perubahan iklim dan kebijakan Kepulauan Marshall.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Kepulauan Marshall baik secara nasional maupun internasional dalam menangani kasus perubahan iklim belum efektif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu negara Kepulauan Marshall dalam mengembangkan kebijakan yang sebelumnya telah diimplementasikan menjadi lebih baik.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mempersembahkan kegunaan

secara akademis dan kegunaan praktis yang diuraikan sebagai berikut :

#### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian diharapkan menyumbangkan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ruang lingkup akademis, khususnya dalam studi Hubungan Internasional. Secara lebih lanjut, penelitian ini dapat diharapkan memberikan gambaran tentang mengapa Kebijakan Kepulauan Marshall di kawasan Pasifik Barat dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim tidak efektif. Penggunaan sudut pandang *Green Theory* dalam penulisan penelitian juga diharapkan dapat menyumbangkan perspektif bagi perkembangan dalam memandang relasi internasional antara manusia, ekonomi, lingkungan, dan aspek lainnya.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat guna memahami kebijakan melalui peranan aktor dan memperluas wawasan mengenai apa yang sedang terjadi berkaitan dengan perubahan iklim dan negara kepulauan di Kawasan Pasifik. Penelitian diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemikiran baru bagi masyarakat dalam memahami dampak perubahan iklim terkhusus mengenai naiknya permukaan laut, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan terkait kajian mengenai kebijakan negara kepulauan dalam menghadapi perubahan iklim di Kawasan Pasifik.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Dalam menganalisis penelitian, penulis mengumpulkan informasi-

informasi yang memiliki relevansi seputar topik yang diteliti. Penelitian terdahulu akan dijadikan sebagai indikator atau tolak ukur serta landasan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian oleh Umam Manik pada tahun 2019 yang membahas mengenai pengadvokasian kepentingan Kepulauan Marshall melalui strategi para independen diplomat. Penelitian tersebut menganalisis bagaimana kekuatan dari teknik diplomasi para diplomat Kepulauan Marshall dalam menyuarakan kepentingannya dalam dunia internasional terkhusus hanya pada tahun 2015 di saat mengikuti *United Nations Climate Change Conference* (Khairul, 2019). Di mana penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, karena penelitian ini akan membahas mengenai ketidakefektifan kebijakan dalam mengatasi perubahan iklim secara nasional dan internasional oleh pemerintah Kepulauan Marshall dengan menggunakan teori yang berbeda yaitu teori hijau atau *green theory*. Artinya, penelitian yang ditulis oleh Khairul tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Kepulauan Marshall, sedangkan dalam penelitian ini akan dibahas mengapa kebijakan Kepulauan Marshall tidak efektif dan tidak sejalan dengan *green theory* melalui artikel, buku, dan jurnal yang tersedia.

Penelitian yang berjudul "*Climate change, ecosystem services and migration in the Marshall Islands: are they related?*" oleh Kees Van der Geest, M. Burkett di tahun 2020 (Kees Van der Geest, 2020). Penelitian ini membahas mengenai kesenjangan-kesenjangan yang ada dan

menyajikan temuan-temuan dari kerja lapangan yang sifatnya interdisipliner di Kepulauan Marshall dalam hubungannya dengan migrasi penduduk dari Kepulauan Marshall ke Amerika Serikat, penelitian tersebut memakai metode kuantitatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa dampak perubahan iklim memiliki korelasi signifikan terhadap kecenderungan migrasi di tingkat rumah tangga. Hal ini memiliki kecocokan dengan penelitian yang akan ditulis, namun berbeda fokusnya. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan metode yang berbeda pula yakni metode kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dalam menjelaskan kebijakan pemerintah dan sisi ketidakefektifannya berdasarkan *green theory* dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim.

Penelitian yang berjudul “Upaya negara-negara Kepulauan Pasifik dalam menghadapi perubahan iklim melalui *Pacific Islands Forum*” oleh Esther Andryani. Penelitian tersebut berfokus kepada upaya beberapa negara di Kepulauan Pasifik (Siubelan, 2019). Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada satu subjek penelitian yaitu Kepulauan Marshall. Selanjutnya, Penelitian yang berjudul “Dampak Perubahan Iklim dan Terbentuknya KAP (*Kiribati Adaptation Program*)” dari penulis asal Universitas Muhamadiyah Malang di mana melalui penelitian ini mempunyai akar permasalahan yang sama dengan penelitian ini, yaitu mengenai perubahan iklim dan peningkatan permukaan laut. Kiribati memiliki status sama dengan Kepulauan Marshall dimana diprediksikan

terancam dan akan tenggelam terlebih dahulu akibat dampak pemanasan global (Ulandari, 2018). Dalam penelitian tersebut membahas mengenai dampak geografis, sosial dan budaya, ekonomi, dan keamanan air. Salah satu langkah dalam mengatasi kerentanan negara Kiribati dalam penelitian tersebut adalah dengan terlibat menjadi bagian dari aliansi iklim internasional. Penelitian tersebut menyatakan bahwa negara Kiribati membentuk KAP untuk mampu beradaptasi dan menghadapi ketidakpastian karena perubahan iklim di Kiribati.

Penelitian yang berjudul “Upaya Republik Kepulauan Marshall dalam Penanganan Potensi Ancaman Perubahan Iklim” yang ditulis oleh Luthfi Fadilah Nazardi pada 2016. Penelitian tersebut memfokuskan kepada kebijakan-kebijakan nasional saja. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan lensa internasional dan keterkaitan dengan aktor lain yang terlibat (Nazardi, 2016).

Penelitian terakhir yang digunakan penulis untuk memperkuat landasan penulisan penelitian ini adalah melalui tesis yang berjudul “Ancaman kenaikan muka air laut bagi negara-negara di Kepulauan Pasifik” dalam penelitian tersebut dijelaskan secara umum bagaimana peningkatan permukaan laut menjadi permasalahan signifikan di mana memberikan ancaman kepada negara-negara yang berlokasi di kepulauan pasifik serta bagaimana organisasi regional misalnya *Melanesian Spearhead Group* dalam menyikapi ancaman tersebut (Wahyudin, 2020). Penelitian tersebut juga membahas dampak terhadap kelangsungan kehidupan sosial dan

budaya masyarakat.

### **1.6. Kerangka Teori**

Isu lingkungan yang dipicu oleh beragam aktivitas manusia dalam skala lokal, regional, dan internasional saat ini berkembang dengan sangat cepat. Degradasi perkotaan, penebangan hutan secara liar, penggunaan plastik, pencemaran lingkungan merupakan aktivitas oleh manusia yang merusak lingkungan. *Green Theory* juga dikenal sebagai teori ekologi atau lingkungan. *Green theory* merupakan pendekatan hubungan internasional yang menekankan berapa pentingnya hubungan antara alam dan manusia. *Green theory* mengakui bahwa masalah lingkungan tidak merupakan masalah teknis atau ilmiah, melainkan masalah politik dan ekonomi yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat internasional.

*Green Theory* juga berpendapat bahwa masalah lingkungan atau alam tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan tradisional dalam hubungan internasional seperti realisme dan liberalisme. Di sisi lain, Teori ini mengusulkan kerangka kerja baru yang memprioritaskan kelestarian lingkungan dan eksistensi keadilan, terutama bagi kehidupan sosial manusia. *Green Theory* bertujuan untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan tersebut dalam hubungan internasional.

*Green Theory* memahami dunia itu sendiri berasal dari sekumpulan ekosistem yang saling memiliki keterkaitan, oleh sebab itu tidak mungkin tercipta suatu pembagian atau pemisahan yang nyata antara manusia dan

lingkungan. *Green Theory* melihat dibutuhkannya kerjasama global dan tindakan yang sifatnya kolektif dalam mengatasi masalah seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan lainnya. *Green theory* mengakui bahwa masalah lingkungan yang sifatnya tidak terbatas tersebut tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing negara atau dengan satu aktor saja. Melainkan, dibutuhkan kerjasama global dalam proses penghasilan solusi efektif dan bijak untuk masalah lingkungan (Hugh, 2018).

Perspektif *Green Theory* yang digunakan dalam penelitian didasarkan dari pemikiran Hugh C. Dyer. Dyer merupakan ilmuwan yang berfokus kepada lingkungan. Salah satu tulisannya yang terkenal berjudul “*Introducing Green Theory in International Relations*” di buku *International Relations Theory* oleh Stephen McGlinchey. Karya Hugh Dyer memberikan pengantar penerapan teori hijau di bidang hubungan internasional dan mengeksplorasi bagaimana isu lingkungan bersinggungan dengan aspek lain, seperti politik dan ekonomi. *Green Theory* yang dikembangkan oleh Hugh Dyer merupakan kerangka teori dalam memahami isu lingkungan.

*Green Theory* yang dikembangkan Dyer mengungkapkan bahwa manusia merupakan bagian terpenting dari sistem ekologi yang sangat besar (Hugh, 2018). Masalah lingkungan merupakan hasil dari cara manusia berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal tersebut didasarkan melalui premis bahwa lingkungan alam bukan sekedar sumber daya yang secara konsisten dapat dieksploitasi, melainkan lingkungan alam adalah

suatu sistem yang sangat kompleks dari makhluk hidup dan hal tersebut haruslah dihormati dan dilindungi dikarenakan saling berhubungan (Hugh, 2018).

Hugh Dyer berpendapat bahwa masalah lingkungan tidak akan diselesaikan hanya dengan berfokus pada solusi teknis dan perubahan perilaku individu. Melainkan, penyebab-penyebab lain yang berasal dari aspek ekonomi dan sosial yang mendasari konflik lingkungan yang harus diatasi. *Green Theory* mengatakan bahwa planet yang berkelanjutan tidaklah didasarkan pada prioritas pertumbuhan ekonomi daripada fokus terhadap kelestarian lingkungan. Sistem ekonomi yang dominan tidak sesuai dengan planet bumi yang sehat dan berkelanjutan dikarenakan beberapa alasan (Hugh, 2018).

Meskipun buku tersebut menyinggung banyak berbagai aspek kebijakan lingkungan dan berkelanjutan dalam konteks hubungan internasional, *chapter green theory* pada buku tersebut tidak berfokus pada evaluasi kebijakan lingkungan melalui indikator khusus. Oleh karena itu, penelitian menggunakan perspektif yang menyatu dengan *Green theory* atau dapat dianggap sebagai variabel pendukung dalam melakukan penelitian ini. Herman Daly merupakan pemikir kebijakan yang mendukung *Green theory*. Herman Daly menekankan integrasi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan suatu negara baik secara nasional maupun internasional. Perspektif Herman melalui bukunya menawarkan cara alternatif yang mengutamakan keutuhan ekologis dan

keberlanjutan jangka panjang (Herman Daly, 2003). Ia menekankan bahwa manusia dapat melakukan pendekatan yang holistik dan sadar lingkungan terhadap pembuatan kebijakan.

Dalam menilai kebijakan nasional dan internasional terkait perubahan iklim, dapat dilakukan dengan cara, Pertama mengenai Relevansi, kebijakan nasional dan internasional yang diadopsi oleh suatu negara dalam menghadapi perubahan iklim. Relevansi merujuk kepada sejauh mana kebijakan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam konteks perubahan iklim. Kebijakan yang sifatnya relevan akan mempertimbangkan dampaknya, kerentanan dan keberlanjutan ekosistem, serta mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang ada. Keberhasilan kebijakan nasional atau internasional suatu negara dalam menghadapi perubahan iklim tergantung pada sejauh mana ia mengatasi masalah secara efektif dan efisien (Herman Daly, 2003)

Selanjutnya adalah Implementasi, implementasi berhubungan dengan kemampuan dalam mengaplikasikan kebijakan perubahan iklim yang telah ditentukan. Efektivitas kebijakan sangat tergantung kepada usaha nyata yang dilakukan dalam menjadikan kebijakan menjadi tindakan yang nyata. Hal tersebut melingkupi seperti pengembangan regulasi yang diperlukan, alokasi sumber daya yang memadai seperti teknologi dan keuangan, pengawasan dan kepatuhan terhadap aktor yang terlibat pada kebijakan, serta komitmen dan konsistensi terkait pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Herman Daly, 2003)

Terakhir adalah Keberlanjutan, Dalam hal ini, Kebijakan nasional dan internasional harus melihat pentingnya dalam mempertahankan dan melanjutkan upaya perubahan iklim dalam jangka panjang. Kebijakan terhadap perubahan iklim harus bersifat efektif dan memiliki pandangan jangka panjang serta mampu bertahan melalui perubahan pemerintahan, fluktuasi ekonomi, atau perubahan prioritas politik. Keberlanjutan mencakup aspek ekonomi, dalam artian kebijakan yang berkelanjutan tersebut harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi. Selain itu, Kebijakan yang sifatnya berkelanjutan harus melibatkan komitmen jangka panjang terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berkesinambungan, mengingat bahwa perubahan iklim merupakan isu jangka panjang yang membutuhkan tindakan yang berkelanjutan (Herman Daly, 2003)

Dengan mempertimbangkan relevansi, implementasi, dan keberlanjutan oleh Herman Daly, penilaian terkait kebijakan perubahan iklim dapat sampai kepada efektivitas dan keberhasilan tersebut dalam menghadapi tantangan perubahan iklim secara efektif dan berkelanjutan. Dalam melakukan penilaian kebijakan tersebut, ada hal-hal yang difokuskan dan dipertimbangkan, *Green theory* menyatakan bahwa dibutuhkan kebijakan yang efektif dalam memberikan perlindungan kepada lingkungan dan menciptakan keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat mencakup penurunan emisi gas rumah kaca, pelestarian sumber daya alam, penggunaan energi terbarukan, perlindungan ekosistem yang

rentan, dan sebagainya (Hugh, 2018).

*Green Theory* menekankan keharusan terhadap kerjasama global dan tindakan kolektif dalam mengatasi masalah lingkungan. Kerjasama global atau internasional merupakan kolaborasi antara negara-negara di seluruh dunia dalam mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Dalam konteks perubahan iklim, kerjasama internasional menjadi sangat penting dikarenakan perubahan iklim merupakan masalah global yang membutuhkan upaya bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak yang dihasilkan. *Green Theory* mengakui bahwa perubahan iklim adalah masalah global yang membutuhkan kerjasama internasional yang kuat. *Green Theory* juga mendukung kebijakan negara yang mendorong kerjasama, koordinasi, dan komitmen global dalam mengatasi perubahan iklim. *Green Theory* berpendapat bahwa isu-isu terkait lingkungan memerlukan upaya-upaya yang terkoordinasi dari semua pihak, termasuk di dalamnya pihak pemerintah, organisasi internasional, kelompok bisnis, dan masyarakat sipil semua negara di dunia (Hugh, 2018).

Selanjutnya, *Green theory* menekankan betapa pentingnya kebijakan yang dihasilkan bersifat adil secara sosial dan ekonomi. Kebijakan terkait perubahan iklim seharusnya tidaklah hanya memperhatikan perlindungan lingkungan, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya kepada manusia, terutama kepada yang rentan secara sosial dan ekonomi. *Green theory* mendukung kebijakan-kebijakan yang memperkuat keadilan sosial

dan mengurangi kesenjangan yang ada. Melalui *Green theory*, Hugh Dyer dan Herman Daly mengungkapkan bahwa pentingnya kolaborasi aktif oleh setiap aktor dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan praktik efektif yang mendukung kelestarian lingkungan, keseimbangan ekonomi, dan keadilan sosial.

*Green theory* menghargai partisipasi yang aktif dan inklusif dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan iklim. Keadilan sosial mengharuskan bahwa kepentingan masyarakat rentan didengar dan diperhitungkan dalam kebijakan perubahan iklim. *Green theory* juga memastikan keadilan dalam distribusi beban dan manfaat dari upaya perubahan iklim. *Green theory* melibatkan keterlibatan masyarakat sipil, kelompok lingkungan, para komunitas lokal, dan negara dalam proses pengambilan keputusan.

*Green theory* tersebut menyatakan bahwa aspek ekonomi haruslah mengutamakan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial serta mengakui nilai sumber daya alam sebagai bagian dari kepemilikan bersama secara internasional (Hugh, 2018). *Green Theory* mengusulkan adanya perubahan yang sifatnya fundamental dari sistem ekonomi dunia saat ini, Dibutuhkan model dari kegiatan ekonomi yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial (Hugh, 2018). Yang mana hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan reorientasi sistem ekonomi yang mendukung praktik berkelanjutan.

Melalui perspektif *Green theory*, kritik umum terhadap pembangunan selalu tercipta, di mana pilihan rasional jangka pendek manusia pada akhirnya akan menghancurkan sumber daya alam. Hal ini membutuhkan perubahan nilai kemanusiaan (Hardin 1968). Pembangunan *sustainable* dan pemikiran *Green theory* merupakan sikap hormat dan perlindungan terhadap keanekaragaman dan kekayaan segala bentuk kehidupan di bumi. Perspektif atau paradigma tersebut juga sebagai bentuk tuntutan dalam menghentikan kebijakan ekonomi dan politik yang hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan serta gaya hidup konsumtif.

Secara keseluruhan, *Green theory* menyediakan kerangka yang sangat komprehensif dalam memahami hubungan dengan kompleksitas yang tinggi antara manusia dan alam. *Green theory* memberikan jalan dalam menciptakan masa depan manusia dengan alam yang lebih adil dan berkelanjutan (Hugh, 2018). Oleh karena itu, sangatlah penting dalam mengatasi penyebab isu sosial dan ekonomi yang mendasari masalah lingkungan, serta mengusulkan perubahan yang mendasar terhadap model ekonomi baru yang memprioritaskan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Kolaborasi setiap aktor dalam kerja sama global sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah lingkungan (Hugh, 2018). Karya Hugh Dyer tentang *Green Theory* dan variabel oleh Herman Daly sebagai indikator atau dimensi yang mencerminkan elemen *Green theory* yang telah memberikan dampak yang signifikan dalam kebijakan negara terkait kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.

## **1.7. Operasionalisasi Konsep**

Dalam meneliti Strategi Kepulauan Marshall dalam Menghadapi Perubahan Iklim Secara Domestik dan Internasional, terdapat beberapa konsep yang akan digunakan, meliputi :

### **1.7.1 Definisi Konsep**

#### **1.7.1.1 Perubahan Iklim**

Perubahan Iklim adalah berbagai fenomena global yang tercipta karena pembakaran bahan bakar fosil dan meningkatkan gas yang memerangkap panas ke atmosfer bumi. Fenomena ini dapat dikatakan dengan pemanasan global, contohnya mencakup perubahan misalnya peningkatan permukaan laut; hilangnya massa es di Greenland, Antartika, Arktik, dan gletser di pegunungan di seluruh dunia, serta terjadinya peristiwa cuaca ekstrim. Perubahan iklim cenderung mengacu padapeningkatan perubahan ukuran iklim selama periode waktu yang lama termasuk curah hujan, suhuda pola angin (NASA, 2022).

#### **1.7.1.2 Pemanasan Global**

Pemanasan global merupakan salah satu aspek dari perubahan iklim dan mengacu pada kenaikan suhu global terutama disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di lapisan atmosfer. Pemanasan global memiliki kecenderungan dalam peningkatan suhu rata-rata bumi. (Rivas, M. D. G., & Gonzalo, 2020).

#### **1.7.1.3 Kenaikan Permukaan Laut**

Sea Level Rise merupakan kenaikan permukaan laut relatif terhadap daratan di suatu lokasi tertentu. Pencairan es kutub adalah faktor penyebab utama naiknya permukaan laut, di mana faktor tersebut merupakan hasil dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang mendorong suhu bumi menjadi lebih tinggi. Jika planet ini melampaui pemanasan 1,5-2 C, maka pencairan es dan kenaikan permukaan laut akan berdampak signifikan terhadap kelestarian lingkungan dan umat manusia (Pugh, D., & Woodworth, 2014)

#### **1.7.1.4 Ineffectiveness**

*Ineffectiveness* atau Ketidakefektifan dalam hubungan internasional terjadi ketika sebuah institusi atau rezim gagal dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Hal ini dapat terjadi didasari oleh berbagai alasan, termasuk kurangnya kemauan politik di antara negara-negara anggota, sumber daya, kapasitas tidak mencukupi, adanya tantangan atau ancaman baru yang tidak dapat diatasi oleh negara/lembaga tersebut (Nye, J. S., & Keohane, 2017)

### **1.7.2 Definisi Operasional**

#### **1.7.2.1 Perubahan Iklim**

Perubahan iklim dalam penelitian ini adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam waktu yang panjang di suatu wilayah dan berdampak bagi negara Kepulauan Marshall. Perubahan iklim bisa merujuk ke suatu lokasi tertentu secara keseluruhan. Perubahan iklim dapat menjadi salah satu penyebab dalam memperkirakan pola cuaca sehingga mempersulit

aktivitas makhluk hidup. Perubahan iklim contohnya seperti badai intens, banjir, hujan deras, dan badai musim dingin. Di daerah kutub, pemanasan suhu global terkait dengan perubahan iklim memiliki arti bahwa lapisan es dan gletser mencair pada tingkat yang cukup tinggi dari musim ke musim. Dimana hal tersebut berkontribusi dalam kenaikan muka air laut di berbagai wilayah di bumi. Pada penelitian ini, Penyebab perubahan iklim pada masa sekarang adalah karena banyaknya aktivitas manusia dalam mengeksploitasi dan merusak, misalnya pembakara bahan bakar fosil, seperti gas alam dan batu bara. Pembakaran bahan tersebut melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer planet bumi yang nantinya akan menjebak panas yang berasal dari sinar matahari di dalam atmosfer yang membuat suhu rata-rata di bumi meningkat.

#### **1.7.2.2 Pemanasan Global**

Kenaikan suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Melalui penelitian ini, aktivitas yang menyebabkan pemanasan global seperti kegiatan industri negara-negara maju akan menjadi perhatian yang utama. Karena kegiatan perindustrian tersebut adalah salah satu alasan mengapa terjadi penipisan dan pencairan es di kutub, cuaca ekstrim yang menyebabkan iklim tidak stabil, dan bencana alam. Pemanasan global berdampak pada iklim lokal, regional, dan bahkan internasional. Sejalan dengan kondisi bumi, diperkirakan bahwa iklim akan selalu berubah, dapat terjadi secara alami namun memerlukan waktu selama ratusan dan ribuan tahun. Di masa sekarang, pemanasan global yang terjadi saat ini

dipengaruhi oleh kegiatan manusia dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Hal inilah yang menciptakan peningkatan muka air laut yang berpotensi menenggelamkan negara Kepulauan Marshall.

### **1.7.2.3 Kenaikan Muka Air Laut**

Pada penelitian ini, peningkatan permukaan laut merujuk pada lapisan es dangletser yang menipis menjadi penyebab utama kenaikan permukaan laut global. Suhu udara yang lebih panas melelehkan permukaan es, sementara air laut yang menjadi hangat karena suhu tersebut mengikis lapisan es dari sisi dan bawahnya. Sehingga memungkinkan lebih banyak es dan air lelehan mengalir ke laut. Oleh sebab itu, peristiwa tersebut mengancam entitas kepulauan kecil, khususnya seperti Kepulauan Marshall. Peningkatan permukaan laut tersebut dapat mengancam keberadaan negara kepulauan dan negara yang memiliki tujuan tertentu di Kepulauan Marshall.

### **1.7.2.4 Ineffectiveness**

Ketidakefektifan dalam penelitian ini merujuk pada kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Kepulauan Marshall dalam mengatasi perubahan iklim. Ketidakefektifan Kepulauan Marshall tidak hanya bergantung pada kemampuan mereka dalam mencapai hasil yang diinginkan, melainkan juga pada kapasitas mereka untuk beradaptasi dan merespons keadaan dan tantangan yang ada. Dalam hal ini, pentingnya ketahanan sebagai faktor kunci dalam menentukan efektivitas jangka

panjang dari kebijakan-kebijakan tersebut.

### **1.8. Argumen Penelitian**

Dari penyusunan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan bahwa peneliti percaya bahwa ada faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan kebijakan iklim di Kepulauan Marshall. Faktor internal berupa kebijakan nasional Kepulauan Marshall yang terdiri dari Proyek MI-LED dan langkah adaptasi lainnya. Sedangkan, melalui faktor eksternal yaitu berkaitan dengan aktor internasional lain, seperti Kebijakan Majuro, UNFCCC, *Paris Agreement*, *South Pacific Regional Environmental Programme* (SPREP), dan aliansi negara kawasan pasifik lainnya yang bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim. Penelitian menggunakan *Green theory* dalam menjelaskan ketidakefektifan kebijakan Kepulauan Marshall tersebut.

### **1.9. Metodologi Penelitian**

Metodologi kualitatif merupakan metode penelitian yang berusaha untuk memahami fenomena dengan mengeksplorasi peristiwa, perspektif, dan makna yang terkandung di dalamnya. Metodologi kualitatif biasanya digunakan dalam penelitian ilmu sosial, seperti hubungan internasional, sosiologi, psikologi, antropologi, dan yang lainnya. Menurut Denzin dan Lincoln (2018) yang merupakan peneliti terkemuka di bidang penelitian kualitatif, Metodologi ini biasanya dikarakteristikan oleh fokusnya yang didasarkan pada pengalaman manusia, penalaran secara induktif, serta menekankan subyektifitas dari

kenyataan (Denzin, N. K., & Lincoln, 2018).

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang meliputi analisis data melalui dokumen, yakni dengan meninjau sumber-sumber yang tertulis yang telah dihasilkan oleh aktor dan peristiwa yang terlibat dengan topik penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur yang sesuai dengan metodologi penelitian kualitatif membahas tentang perubahan iklim, yaitu: Hasil wawancara dengan aktor yang terlibat membahas perubahan iklim di Kepulauan Marshall, Studi Kasus yang memberikan analisis mendalam tentang contoh secara lebih spesifik mengenai dampak dan respon terhadap perubahan iklim. Serta tinjauan literatur terkait perubahan iklim yang dapat berkontribusi dalam memahami kesenjangan terkait pengetahuan yang sedang diteliti dan memberikan dasar bagi penelitian yang lebih lanjut.

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penulis berusaha dalam memaparkan fakta dan data yang telah dikumpulkan, serta menjelaskan relevansi dan melakukan analisis antara fakta dan data untuk menjawab rumusan masalah “Mengapa Penerapan Kebijakan Penanganan Perubahan Iklim Kepulauan Marshall tidak efektif?”

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian dari penelitian ini adalah Kota Semarang, di mana penulis melakukan *desk research* dari tempat penulis tinggal.

### **1.9.3 Objek Penelitian**

Adapun objek dari penelitian ini difokuskan pada kebijakan Kepulauan Marshall dalam mengatasi perubahan iklim.

### **1.9.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Melalui data primer, penulis berusaha untuk mencari data tentang Kebijakan Kepulauan Marshall dalam mengatasi perubahan iklim. Sedangkan melalui data sekunder untuk penelitian ini berasal dari data-data pernyataan dari pejabat atau petinggi Kepulauan Marshall dan bersangkutan yang dikutip dari media dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu seperti yang tercantum di buku, jurnal, dan sumber lainnya.

### **1.9.5 Sumber Data**

Dalam penulisan penelitian, penulis menggunakan data yang berasal dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Menurut Denzin dan Lincoln (2018) data primer mengacu pada data asli yang telah dikumpulkan dalam melakukan suatu penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni melalui: Dokumen, penulis menggunakan materi tertulis yang dihasilkan oleh aktor yang terlibat terkait topik penelitian, seperti melalui dokumen resmi dari Pemerintah Kepulauan Marshall (Denzin, N. K., & Lincoln, 2018).

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian kualitatif meliputi, Sumber yang dipublikasikan, penulis menggunakan materi yang dipublikasikan melalui buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan laporan

pemerintah dalam mengumpulkan data-data terkait penelitian. Sumber arsip, penulis menggunakan bahan arsip seperti dokumen sejarah dalam memperoleh wawasan dan sumber yang luas mengenai topik penelitian. Sumber internet, penulis menggunakan sumber yang diperoleh secara online, seperti melalui sosial media dan forum online dalam mengumpulkan data tentang topik penelitian. Sumber organisasi, penulis juga menggunakan dokumen organisasi seperti laporan tahunan, laporan keuangan, dan memo internal dalam mengumpulkan data tentang topik penelitian.

#### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data non numerik dari studi kepustakaan.

#### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian melalui analisis data kualitatif berusaha untuk memahami fenomena sosial dari perspektif setiap aktor yang terlibat (Strauss, 1987). Analisis dengan menggunakan data kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa dan kompleksitas fenomena sosial (Strauss, 1987). Dalam analisis dan interpretasi data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu *Planng & Preparation*, mengidentifikasi pertanyaan dan tujuan penelitian, serta pengembangan instrument pengumpulan data. *Data Collection*, bertujuan dalam mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai metode seperti

observasi dan analisis dokumen secara sistematis dan konsisten untuk menjamin kualitas data. *Data Transcription & Management*, bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kerahasiaan data. *Validation & Verification*, bertujuan untuk memeriksa validitas data dengan memverifikasi data melalui sumber data lain.